J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Collaborative Governance dalam Pembinaan Kemandirian Mebel di Lapas Kelas IIA Binjai

Yoshep Ferdinand Sitompul[1], Lauditta Indahdewi[2]
[1,2]Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
E-mail: yferdinandsitompul@gmail.com[1], indahdewi.lauditta@gmail.com[2]

Article History:
Received: 08 Desember 2024
Revised: 28 Desember 2024
Accepted: 31 Desember 2024

Keywords: *Kolaborasi, Pembinaan Kemandirian, Narapidana*

Abstract: *Pembinaan kepada narapidana ditujukan untuk memberikan bekal untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana. Sehingga lembaga pemasyarakatan wajib memberikan fasilitas terhadap narapidana untuk mengembangkan potensi salah satunya dengan memberikan pelatihan kerja kepada narapidana. Agar pelatihan kerja kepada narapidana berjalan optimal maka diperlukan kerja sama antara lembaga pelatihan kerja maupun pemerintah atau sektor swasta yang terkait. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai penerapan serta faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan collaborative governance pada pembinaan kemandirian mebel di Lapas Kelas IIA Binjai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan serta faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan collaborative governance pada pembinaan kemandirian mebel di Lapas Kelas IIA Binjai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalam teori collaborative governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui sumber data primer dan sekunder yang terdiri dari wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini adalah dilog tatap muka antara Lapas Kelas IIA Binjai dengan Balai Latihan Kerja dan Yayasan Srikandi; lapas membangun kepercayaan dengan pihak terkait; komitmen secara tertulis antara lapas dengan pihak terkait; adanya pemahaman bersama antara ketiga pihak; narapidana yang mampu membuat karya mebel yang sesuai standar pasar*

PENDAHULUAN

Sistem Pemasyarakatan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwasanya sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah serta batas dan juga metode didalam melaksanakan fungsi Pemasyarakatan dengan terpadu. Hal ini menggarisbawahi peran penting pemasyarakatan didalam melakukan peningkatan kualitas pribadi

serta warga binaan yang mandiri supaya menyadari kesalahannya serta mau dalam memperbaiki diri serta tidak akan mengulangi tindak pidana serta warga binaan dipersiapkan agar bisa kembali ke masyarakat dengan memberikan bimbingan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu tempat yang berfungsi untuk melakukan binaan kepada narapidana. Lapas bukan lagi menjadi fase terakhir dalam sistem peradilan pidana melainkan mulai dari awal yaitu dimulai proses pra ajudikasi, ajudikasi sampai post ajudikasi. Dalam hal ini post ajudikasi di Lapas, narapidana mendapat pembinaan yang bertujuan untuk membimbing mereka dalam memahami kesalahan yang sudah dilakukan, memperbaiki diri, serta menghindari kembali terlibat dalam kejahatan. Pembinaan ini melibatkan pembina, narapidana, dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas narapidana agar masyarakat bisa menerima serta bisa melakukan kontribusi kepada pembangunan.

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana mengalami tahap perkembangan melalui berbagai program, seperti program pembinaan kepribadian dan kemandirian, yang bertujuan untuk membekali mereka dengan keterampilan sosial dan kewirausahaan. Melalui program ini, diharapkan narapidana dapat menjadi lebih produktif dan mandiri, serta memperbaiki diri atas kesalahan yang telah dilakukan dan untuk membantu narapidana kembali pada kehidupan yang positif dan produktif di masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan serta pembimbingan terhadap narapidana, pada pasal 1 menjelaskan bahwa pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam berbagai aspek, termasuk ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, aspek spiritual, perilaku serta sikap, kesehatan fisik, kerja serta mental narapidana, serta kondisi lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan merupakan proses pembelajaran yang melibatkan penghapusan pemahaman yang telah dimiliki, dengan maksud membantu individu untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan yang telah dimilikinya, serta memperoleh keterampilan serta pengetahuan baru didalam pencapaian tujuan hidup dan pekerjaan secara lebih efisien. (Mangunhardjana, 1991:12)

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 pasal 1 mengenai kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan, mitra kerjasamanya mencakup instansi pemerintah terkait lainnya, organisasi masyarakat, dan/atau individu yang bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau Badan Pemasyarakatan (BAPAS) dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan atau pembimbingan terhadap individu yang terlibat dalam tindak kriminal. Dalam pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa kerjasama dengan instansi pemerintah atau pihak swasta (non pemerintah) diselenggarakan untuk meningkatkan pengembangan, peningkatan dana tau perluasan pembinaan dan bersifat fungsional dan kemitraan. Dalam pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa hubungan kerjasama pembinaan dilaksanakan berdasarkan program pembinaan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas Narapidana mengenai keterampilan kerja.

Kerjasama dianggap berhasil jika tujuan yang diinginkan oleh setiap pihak dalam kerjasama tersebut sejalan dan mendukung tujuan bersama. Kesesuaian ini menjadi dasar utama dalam pelaksanaan kerjasama. Kegiatan kerjasama juga dinilai dari kemampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan atau bahkan melampaui ekspektasi. Hasil tersebut dapat berupa peningkatan kinerja, pelayanan yang lebih baik, inovasi, atau keuntungan bersama. Dalam upaya mencapai kerjasama yang maksimal, penting bagi setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang seragam

mengenai tujuan, peran, dan tanggung jawab masing-masing, serta menjaga komunikasi yang terbuka dan kolaboratif sepanjang proses kerjasama.

Kerjasama ini membawa dampak positif dalam pembentukan kepribadian dan mental narapidana. Melalui kolaborasi antara Lapas, narapidana, dan masyarakat, narapidana dapat memperoleh dukungan yang diperlukan untuk memperbaiki diri dan mengembangkan keterampilan yang dapat berguna bagi mereka ketika kembali ke masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitasi narapidana juga dapat membantu mengurangi stigma negatif terhadap mereka dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk reintegrasi sosial.

Dalam penelitian Sunia (2022) tentang "Model Kemitraan Dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang" menjelaskan tentang eksplorasi Model Kemitraan didalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana. Temuan penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam implementasi pembinaan yang berkaitan dengan kerjasama penyelenggaraan pembinaan, mengakibatkan minimnya hubungan kemitraan yang terbentuk dan stagnasi hasil karya narapidana. Ketidakjelasan dalam kemitraan yang sudah terbentuk karena kurangnya dokumen tertulis yang menata hubungan di antara beberapa pihak yang memiliki keterlibatan. Meskipun program pembinaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, kurangnya faktor yang mendukung program juga bisa dijadikan hambatan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, model kemitraan yang sudah terbentuk belum menunjukkan kerjasama yang maksimal.

Isu yang dibahas dalam artikel tersebut tentang model kemitraan didalam program pembinaan kemandirian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang bisa dihubungkan dengan situasi di Lapas Kelas IIA Binjai. Di kedua lembaga tersebut, terdapat upaya untuk meningkatkan kemandirian narapidana melalui kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dan pihak eksternal, seperti Balai Pelatihan kerja dan Yayasan Srikandi.

Salah satu masalah utama yang disoroti dalam artikel tersebut adalah kurangnya kemitraan yang terjalin, yang menyebabkan stagnasi hasil karya narapidana. Ini juga bisa menjadi permasalahan di Lapas, di mana kerjasama antara lembaga pelatihan kerja dan Lapas mungkin belum optimal. Kurangnya keselarasan dalam implementasi pembinaan, juga bisa menjadi tantangan yang relevan di Lapas Kelas IIA Binjai.

Dengan mempertimbangkan temuan dalam artikel tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi kemungkinan masalah serupa yang mungkin dihadapi oleh Lapas Kelas IIA Binjai dalam menerapkan program kerjasama pelatihan keterampilan. Analisis terhadap hambatan-hambatan ini dapat memberikan wawasan penting bagi penelitian skripsi ini, tentang bagaimana agar kerjasama antara Lapas Kelas IIA Binjai dan lembaga pelatihan bisa terjalin dengan baik, efektif dan berkesinambungan, serta menghasilkan output para narapidana yang siap kembali ke masyarakat.

Pembinaan kemandirian dalam bidang mebel di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan potensi narapidana melalui pengembangan keterampilan dan keahlian yang relevan dengan industri mebel. Kegiatan pembinaan ini dilakukan melalui kerjasama antara lembaga pelatihan kerja, pemerintah, dan sektor swasta dalam mengelola program-program pelatihan dan pembinaan. Industri mebel dipilih sebagai fokus utama pembinaan kemandirian karena memiliki potensi ekonomi yang signifikan serta memberikan peluang kerja yang luas.

Kerjasama antara lembaga pelatihan kerja, pemerintah, dan sektor swasta menjadi krusial dalam mendukung keberhasilan pembinaan kemandirian mebel di Lapas Kelas IIA Binjai. Melalui kolaborasi ini, program pembinaan kemandirian dapat didukung dengan sumber daya dan pengalaman yang memadai, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi narapidana yang

terlibat.

Program pembinaan kemandirian mebel di Lapas Kelas IIA Binjai bertujuan untuk tidak hanya mengembangkan keterampilan baru pada narapidana, tetapi juga memastikan bahwa keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan secara efektif setelah mereka kembali ke masyarakat. Dengan melibatkan narapidana secara aktif dalam program-program pembinaan di bawah pengawasan petugas, diharapkan mereka dapat menjadi lebih mandiri dan memiliki peluang yang lebih baik untuk memulai kehidupan baru setelah masa pemasyarakatan.

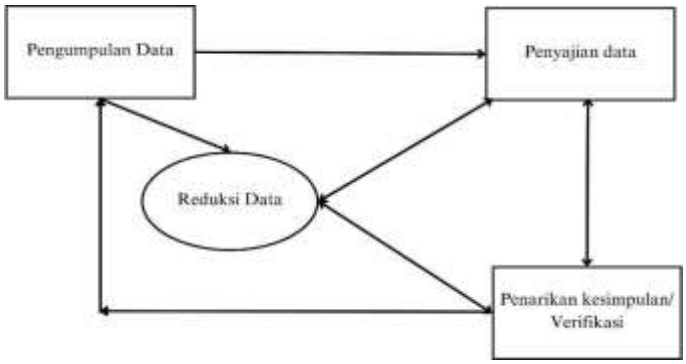
Dalam konteks ini, pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kota Medan, Yayasan Srikandi dan Lapas Kelas IIA Binjai menjadi relevan. Melalui program pembinaan pelatihan kerja, narapidana dapat memperoleh pengalaman praktis sebelum memasuki dunia kerja, memperluas jaringan, meningkatkan keterampilan, serta mendapatkan sertifikat nasional. Selain itu, pelatihan tersebut juga memberikan peluang bagi narapidana untuk membuka usaha sendiri setelah mereka kembali ke masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini akan lebih terfokus dan relevan dengan kebutuhan yang sebenarnya di lapangan. Berdasar pada latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul "**Collaborative Governance Dalam Pembinaan Kemandirian Mebel Di Lapas Kelas IIA Binjai**"

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan fenomena secara menyeluruh dengan pendekatan ilmiah yang menitikberatkan pada proses dan makna. Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan fakta lapangan, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data (Setiawan & Et al., 2019). Dalam penelitian kualitatif, meskipun tidak menolak informasi berbentuk angka atau data kuantitatif, fokus utamanya tetap pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena melalui analisis kata-kata dan deskripsi holistik. Fiantika et al., (2021) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mendalami suatu fenomena tertentu, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan subjek penelitian. Peneliti dalam metode ini mengumpulkan data yang kemudian dianalisis secara induktif, di mana makna dan pemahaman lebih diprioritaskan daripada generalisasi. Metode ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, studi dokumen, dan partisipasi aktif, dengan penekanan pada pemahaman konteks dan perspektif subjek penelitian. Selain itu, peneliti juga harus memastikan etika penelitian terpenuhi, termasuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah memperoleh informasi faktual mengenai suatu fenomena dan menjelaskan secara rinci melalui kata-kata dan gambar, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif dan menyeluruh tentang fenomena yang sedang diamati. Dalam hal desain penelitian, rancangan penelitian berfungsi sebagai strategi untuk pengumpulan data dan menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian kualitatif biasanya menggunakan teori sebagai panduan sementara, karena masalah penelitian yang diajukan bersifat fleksibel dan dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Peneliti kualitatif harus mampu meninggalkan teori yang sudah ada dan fokus pada pengalaman langsung dari partisipan atau sumber data di lapangan. Desain penelitian deskriptif kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Andi Prastowo (2011) dan Nana Syaodih Sukmadinata (2011), menekankan pada deskripsi fenomena secara alami maupun hasil rekayasa manusia, dengan penekanan pada karakteristik dan hubungan antar kegiatan tanpa melakukan intervensi pada variabel yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati kondisi sebagaimana adanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta menghasilkan data yang akurat dan relevan tanpa manipulasi.

Teknik analisis data merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menyusun, dan menginterpretasi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti catatan lapangan atau dokumen. Proses ini bertujuan mengorganisir data menjadi kategori tertentu, mensintesis pola-pola, serta mencapai pemahaman yang mendalam guna mengembangkan hipotesis atau teori. Dalam konteks analisis data kualitatif, pendekatan yang digunakan bersifat induktif, di mana data yang diperoleh dijelaskan terlebih dahulu sebelum diambil kesimpulan dalam bentuk hipotesis. Tahapan analisis data, sebagaimana diungkapkan oleh Fiantika et al., (2021), mencakup beberapa langkah utama. Langkah pertama adalah pengumpulan dan reduksi data, yang mengacu pada proses penyederhanaan dan pengabstrakan data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Menurut Miles & Huberman (1992), reduksi data berlangsung terus menerus sepanjang penelitian dengan cara meringkas, mengkode, serta menelusuri tema untuk kemudian dikelompokkan dan diorganisir. Ini memungkinkan peneliti untuk menyederhanakan kompleksitas data sehingga kesimpulan yang valid dapat ditarik. Tahapan selanjutnya adalah penyajian data, di mana hasil analisis disusun dalam bentuk matriks. Matriks digunakan untuk menyusun data secara terstruktur, membantu peneliti memahami hubungan antar data, serta memudahkan interpretasi dan identifikasi pola-pola penting dalam data yang diteliti. Matriks juga memfasilitasi komunikasi hasil penelitian kepada pembaca atau pemangku kepentingan secara jelas dan efektif. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses ini melibatkan metode analisis seperti Content Analysis yang mengidentifikasi simbol-simbol dalam komunikasi, serta memprediksi hasil dengan menerapkan kriteria tertentu. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan verifikasi data untuk memastikan validitas dan keandalannya melalui berbagai teknik seperti triangulasi data, diskusi dengan pakar, serta penerapan validitas internal dan transferabilitas hasil penelitian. Verifikasi juga berfungsi untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipahami dan diterapkan oleh pembaca, serta memastikan konsistensi hasil melalui diskusi dengan pakar di bidang terkait.



Sumber: Model Miles dan Huberman

Gambar 1. Pengolahan Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Collaborative Governance dalam Pembinaan Kemandirian Mebel di Lapas Kelas IIA Binjai

Dialog tatap muka dalam konteks pembinaan kemandirian mebel di Lapas Kelas IIA Binjai merupakan elemen kunci dalam memastikan keberhasilan program. Melalui dialog ini, berbagai pihak yang terlibat, seperti instruktur, narapidana, dan pihak eksternal, dapat saling berbagi informasi, mengevaluasi proses pembinaan, serta menyusun strategi untuk meningkatkan hasil yang diinginkan. Dialog ini tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai

forum untuk membahas dan menyelesaikan berbagai tantangan yang muncul selama pelaksanaan program. Dengan berkurangnya ego sektoral dan meningkatnya rasa saling hormat antar pihak, dialog ini memperkuat sinergi yang sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan program. Komunikasi langsung yang terjalin secara rutin memungkinkan setiap pihak untuk memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan lapangan.

Lebih lanjut, pertemuan rutin dalam dialog tatap muka juga berfungsi sebagai sarana pengawasan dan evaluasi program secara berkala. Setiap pihak, baik dari Lapas, instruktur, maupun mitra eksternal, dapat memberikan umpan balik yang konstruktif mengenai kinerja narapidana dan kualitas produk yang dihasilkan. Proses evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa program pembinaan kemandirian mebel tetap relevan dengan kebutuhan pasar dan mampu meningkatkan keterampilan narapidana dalam menghadapi kehidupan setelah masa pidana. Selain itu, kejujuran dan keterbukaan yang terjalin selama dialog ini membantu memperkuat kepercayaan antara semua pihak yang terlibat, yang pada gilirannya mendorong komitmen bersama untuk mencapai tujuan program. Dengan adanya dialog yang konsisten dan kolaboratif, Lapas Kelas IIA Binjai dapat terus mengembangkan program ini sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi narapidana dan masyarakat luas.

Komitmen terhadap proses adalah elemen penting dalam menjaga keberhasilan kerjasama, terutama dalam program pembinaan di Lapas Kelas IIA Binjai. Setiap pihak yang terlibat harus memiliki komitmen kuat untuk memastikan bahwa tujuan dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai bersama-sama. Kolaborasi yang sukses tidak bisa terjadi hanya dengan upaya satu pihak, melainkan memerlukan pengakuan terhadap saling ketergantungan antara semua pihak yang terlibat. Saling memahami ketergantungan ini menjadi kunci keberlanjutan kerjasama, di mana setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh satu pihak akan mempengaruhi pihak lainnya. Kolaborasi ini juga diwujudkan dalam bentuk komitmen tertulis, seperti perjanjian resmi yang mengikat antara Lapas dan Balai Latihan Kerja (BLK), serta Yayasan Srikandi, yang memperkuat kepercayaan dan sinergi di antara mereka. Komitmen ini terlihat dari berbagai tindakan nyata, seperti penyediaan fasilitas yang memadai untuk pelatihan, pemeliharaan sarana, dan jaminan keselamatan dalam pelaksanaan program. Selain itu, peran serta instruktur dari BLK dalam memberikan pelatihan berbasis praktik terbaik industri mebel juga menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah upaya serius untuk memberdayakan narapidana melalui pelatihan keterampilan yang relevan. Instruktur tidak hanya menyampaikan materi pelatihan, tetapi juga terlibat dalam evaluasi dan pengembangan kurikulum untuk meningkatkan efektivitas program. Kepemilikan bersama atas proses ini dirasakan oleh semua pihak, di mana setiap elemen dari program pembinaan berjalan secara selaras dan berkesinambungan demi pencapaian hasil yang optimal bagi narapidana.

Berbagi pemahaman (share understanding) merupakan aspek krusial dalam setiap bentuk kerja sama, termasuk kolaborasi yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Binjai dengan balai latihan kerja dan berbagai pihak terkait. Dalam kerangka ini, para pemangku kepentingan perlu terus menyampaikan informasi mengenai capaian yang berhasil mereka raih serta bagaimana kerja sama tersebut membantu mereka mencapai tujuan bersama. Pemahaman yang sama tentang visi, misi, tujuan, serta kesamaan ideologi sangat diperlukan agar semua pihak bergerak ke arah yang sama. Berbagi pemahaman tidak hanya mempermudah dalam mengatasi tantangan yang muncul selama proses kolaborasi, tetapi juga memperkuat kohesi antar pihak yang terlibat. Tujuan bersama yang jelas, yang terwujud dalam program pembinaan kemandirian di bidang mebel, menunjukkan bagaimana kolaborasi tersebut bertujuan untuk mendampingi dan membina narapidana agar

memiliki keterampilan praktis yang dapat mereka gunakan setelah menjalani hukuman. Dalam kolaborasi ini, narapidana tidak hanya diajarkan keterampilan teknis tetapi juga nilai-nilai kerja sama, penghargaan terhadap hasil kerja, dan sikap saling menghormati. Pemahaman bersama ini tercermin dari kesepakatan terkait definisi masalah yang muncul, seperti keterbatasan sarana dan prasarana serta perbedaan tingkat keterampilan narapidana. Dengan identifikasi masalah yang komprehensif, solusi dapat dirancang secara kolektif dan efektif. Selain itu, kolaborasi ini juga mengedepankan nilai-nilai bersama, di mana setiap pihak menghargai profesionalisme dan kualitas pelatihan yang diberikan, meskipun terdapat perbedaan latar belakang di antara narapidana dan pihak eksternal. Nilai-nilai ini mendorong terciptanya lingkungan kerja yang harmonis, di mana semua pihak saling mendukung demi mencapai tujuan bersama. Keberhasilan program tidak hanya dinilai dari hasil pelatihan teknis yang diperoleh narapidana, tetapi juga dari bagaimana kolaborasi tersebut membangun rasa kebersamaan yang kuat di antara semua pihak yang terlibat, sehingga memberikan kontribusi positif, baik bagi narapidana itu sendiri maupun bagi masyarakat yang akan menerima mereka setelah masa pidana selesai.

Hasil sementara dalam evaluasi program pembinaan kemandirian mebel di Lapas Kelas IIA Binjai menunjukkan pencapaian yang signifikan, terutama pada tahap-tahap awal dan menengah. Perubahan ini penting sebagai indikator keberhasilan program sebelum mencapai tujuan jangka panjang, dan salah satu contoh keberhasilan kecil yang diraih adalah peningkatan keterampilan narapidana dalam pembuatan mebel. Pada awal pelaksanaan program, narapidana di Lapas Kelas IIA Binjai masih kurang memahami dasar-dasar keterampilan ini, namun seiring berjalannya waktu dan dengan adanya kerja sama antara pihak lapas dan Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Medan serta Yayasan Srikandi, mereka berhasil menghasilkan produk mebel yang memenuhi standar pasar. Peningkatan ini bukan hanya tentang keterampilan teknis, tetapi juga mencakup perkembangan pribadi narapidana, seperti peningkatan rasa percaya diri yang akan menjadi modal penting bagi mereka setelah menyelesaikan masa hukuman. Selain keterampilan teknis, narapidana juga mulai menunjukkan adaptasi yang baik terhadap lingkungan kerja yang terstruktur, yang mencakup kerja sama tim, mengikuti instruksi, serta menghargai kualitas dalam setiap proses pembuatan mebel. Keberhasilan ini, meskipun mungkin tampak sederhana, telah memberikan dorongan yang besar bagi narapidana untuk terus meningkatkan kemampuannya. Keberhasilan kecil seperti ini memainkan peran penting dalam membangun fondasi yang kuat menuju keberhasilan yang lebih besar di masa depan. Sebagai bagian dari rencana strategis, langkah-langkah yang diambil oleh Lapas bersama BLK Kota Medan mencakup penyusunan kurikulum pelatihan yang sesuai dengan standar industri, penyesuaian metode pelatihan berdasarkan kebutuhan narapidana, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Kolaborasi yang kuat antara semua pihak ini menunjukkan bahwa program pembinaan kemandirian mebel di Lapas Kelas IIA Binjai tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pengembangan narapidana secara menyeluruh.

Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Collaborative Governance dalam Pembinaan Kemandirian Mebel di Lapas Kelas IIA Binjai

Pelaksanaan program pembinaan kemandirian mebel di Lapas Kelas IIA Binjai telah berjalan dengan cukup baik dan menunjukkan hasil yang sangat luar biasa. Namun, dalam proses pelaksanaannya, berbagai hambatan muncul yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas program ini. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan waktu yang dimiliki narapidana untuk mengikuti pelatihan. Jadwal harian narapidana yang padat seringkali membatasi konsistensi kehadiran dalam sesi pelatihan. Keterbatasan ini tidak hanya mengganggu partisipasi peserta, tetapi juga berpengaruh pada kedalaman materi yang disampaikan, yang idealnya

membutuhkan waktu lebih lama untuk dipahami secara menyeluruh. Sebagai hasilnya, pelatihan harus dipadatkan, yang menyebabkan pembelajaran tidak bisa berjalan seoptimal mungkin. Selain itu, motivasi narapidana juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Tidak semua narapidana memiliki antusiasme yang sama, beberapa di antaranya merasa program ini tidak sesuai dengan minat pribadi mereka, sehingga partisipasi aktif mereka juga berkurang. Hambatan ini menjadi tantangan yang harus dihadapi melalui penjadwalan yang lebih fleksibel dan pendekatan yang lebih motivasional.

Selain keterbatasan waktu, aspek fasilitas dan sarana prasarana juga menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program ini. Banyak peralatan yang digunakan dalam pelatihan mebel di Lapas Kelas IIA Binjai sudah tidak layak pakai atau kurang memadai untuk kebutuhan pelatihan yang semakin berkembang. Ketidaklayakan alat ini tidak hanya menghambat proses pelatihan, tetapi juga mengurangi efektivitas narapidana dalam menguasai keterampilan baru yang relevan dengan dunia kerja. Tanpa dukungan peralatan yang memadai, pelatihan praktis menjadi sulit untuk mendekati kondisi kerja nyata di industri. Selain itu, keterbatasan sumber daya untuk pemeliharaan peralatan juga memperburuk keadaan, dengan banyak alat yang rusak atau tidak terawat, memperlambat pelaksanaan pelatihan. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih terhadap penyediaan fasilitas yang layak, serta perbaikan sarana dan prasarana agar pelatihan dapat berlangsung dengan lebih efektif dan relevan.

Hambatan lainnya dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian ini adalah keterbatasan sumber daya dalam hal materi pelatihan dan koordinasi antara pihak Lapas dan instruktur dari balai latihan kerja. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan standar industri, materi pelatihan harus selalu diperbarui agar sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Namun, keterbatasan sumber daya menyebabkan materi pelatihan sering kali tidak up-to-date, yang dapat mengurangi relevansi keterampilan yang diajarkan. Selain itu, perbedaan prioritas dan jadwal antara pihak Lapas dan balai latihan kerja juga mengakibatkan kurangnya koordinasi, yang pada gilirannya memperlambat proses pelatihan dan evaluasi. Untuk mengatasi masalah ini, komunikasi yang lebih baik dan perencanaan yang lebih matang sangat diperlukan agar program pembinaan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang optimal bagi narapidana.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian mengenai penerapan Collaborative Governance dalam pembinaan kemandirian mebel di Lapas Kelas IIA Binjai menunjukkan bahwa proses kolaborasi antara berbagai pihak telah berjalan dengan baik. Salah satu penerapan utamanya adalah dialog tatap muka yang dilakukan secara rutin antara Lapas, Balai Pelatihan Kerja, dan Yayasan Srikandi. Dialog ini berfungsi untuk menyamakan persepsi dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam pembinaan kemandirian mebel, serta memastikan bahwa hasil kerja narapidana memenuhi standar yang ditetapkan. Dialog ini juga menjadi sarana evaluasi triwulanan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan efektif. Selain itu, kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dibangun melalui komunikasi yang efektif dan dukungan berkelanjutan. Melalui kegiatan pembinaan ini, narapidana diberi kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang akan berguna bagi mereka setelah masa hukuman berakhir.

Komitmen terhadap proses pembinaan juga merupakan bagian penting dari kolaborasi ini. Semua pihak yang terlibat memiliki dedikasi penuh dalam memastikan pelatihan berjalan dengan baik, mulai dari penyediaan materi hingga pelaksanaan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan Lapas. Komitmen ini dibuktikan dengan adanya penyelarasan program pelatihan dengan kebutuhan pasar, sehingga keterampilan yang diajarkan relevan dan aplikatif. Standar tinggi yang

diterapkan dalam proses pelatihan juga menunjukkan profesionalisme yang konsisten dari pihak-pihak terkait. Hasil sementara dari pelatihan ini adalah kemampuan narapidana dalam memproduksi karya mebel yang sesuai dengan standar pasar, peningkatan rasa percaya diri, serta kesiapan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja di masa depan.

Meskipun proses pembinaan ini menunjukkan hasil yang positif, terdapat beberapa hambatan dalam penerapan Collaborative Governance di Lapas Kelas IIA Binjai. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan waktu yang dimiliki narapidana untuk mengikuti pelatihan, mengingat padatnya jadwal harian mereka. Keterbatasan fasilitas dan alat yang tidak memadai juga menjadi tantangan, di mana alat yang digunakan sering kali sudah tidak layak pakai. Keterbatasan sumber daya lainnya termasuk materi pelatihan yang tidak selalu up-to-date dengan perkembangan industri. Perbedaan prioritas dan jadwal antara pihak Lapas dan instruktur balai latihan juga kerap menyebabkan kurangnya koordinasi yang memadai. Hambatan-hambatan ini perlu ditangani agar program pembinaan kemandirian dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal bagi narapidana.

DAFTAR REFERENSI

Afandi, M., Sudartini, S., Anomsari, E., & Novira, A. (2022). Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Konseptual Model Collaborative Governance dan Implementasi Pencapaian SDGs pada studi Intervensi Stunting di Pemerintahan Daerah. DEEPUBLISH.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Dimas, M. J., & Sumbogo, S. (2019). Efektivitas Pembekalan Keterampilan Narapidana melalui Program Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta. Jurnal Anonime

Equatora. (2018). Mendorong Kemandirian Narapidana: Pengembangan Keterampilan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Pemasyarakatan, 45-58.

Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF. PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.

Harsono Hs, C.I. (1995). Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan

Mangunhardjana, AM. (1991). Pembinaan Arti dan Metodenya. Yogyakarta: Kanisius

Miles dan Huberman, (1992) Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Poernomo, B. (1986). Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan. Yogyakarta: Liberty

Prastowo, A. (2011). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Pratama, E., & Fauzi, A. (2018). Efektivitas Program Bimbingan Kerja dalam Mengembangkan Life Skill Warga Binaan Penjara. Journal of Nonformal Education and Community Empowerment, 2(2), 126-140.

Rahman. (2020). Pembelajaran Kolaboratif di Lingkungan Penjara: Analisis Studi Kasus. Jurnal Pendidikan Kriminologi, 7(2), 45–67.

Robbins, & Stephen, P. (2007). Perilaku Organisasi (11th ed.). PT. Index kelompok Gramedia, Jakarta.

Samudra, I. A. (2022). Efektivitas Kerja Sama Pihak Ketiga dalam Proses Pembinaan Warga

Binaan Pemasyarakatan (Community Based Correctional) Lapas Terbuka Nusakambangan. Jurnal Recidive, 11(2).

Sanusi, A. (2016). Metodologi Penelitian Bisnis. Cetakan Keenam. Jakarta: Salemba Empat.

Setiawan, H. R., & Et al. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bildung Nusantara.

Suandika, I. N., & Wirasatya, I. G. N. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP): Tinjauan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar. Raad Kertha.

Sujatno, A. (2012). Negara Tanpa Penpjara : Sebuah Renungan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sukmadinata, N. S (2011), Landasan Psikologi Proses Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sunia, U. (2022). Model Kemitraan Dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang. DECISION: Jurnal Administrasi Publik, 5(01). https://doi.org/10.23969/decision.v5i01.5571

Syamsu Yusuf LN. (2004). Psikologi Perkembangan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Utari, S., Edison, & Kurnianingsih, F. (2022). Model Kemitraan dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang. Journal of Public Administration Studies.

Yudiana, I. A., Cikusin, Y., & Sekarsari, R. W. (2019). Pembinaan Narapidana Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang). Jurnal Respon Publik.

Zaki, M. G. S., & Anwar, U. (2022). Pembinaan kemandirian melalui keterampilan kerja dalam upaya meningkatkan keahlian sebagai bekal narapidana kembali ke masyarakat (Studi pada Rutan Kelas IIB Kebumen). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (Mei, 2022)

Zulkarnaen, & Rahim, A. (2022). Collaborative Governance Model Kolaborasi antar Stakeholder dalam pengelolaan sungai/parit sebagai batas daerah kota pontianak dengan kabupaten kubu raya. SCOPINDO.